

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Penelitian Terdahulu

Hasanah (2003) dalam penelitiannya yang berjudul “Perubahan Perilaku Terhadap Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada Usahatani Padi (*Oryza sativa*) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi”. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengenali sejauhmana perubahan perilaku petani dan mengerahui serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku petani terhadap teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pada usahatani padi di daerah penelitian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa perubahan perilaku petani terhadap teknologi PHT pada usahatani padi termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan faktor-faktor yang memiliki hubungan mempengaruhi tingkat adopsi petani terhadap teknologi PHT pada usahatani padi adalah tingkat partisipasi petani, luas lahan garapan dan sifat inovasi.

Suwantoro (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis pengembangan pertanian organik di kabupaten magelang (studi kasus di kecamatan sawangan) menyatakan bahwa hasil penelitian pengembangan pertanian organik menghadapi berbagai kendala yaitu : pertanian organik dipandang sebagai sistem pertanian yang merepotkan, ketrampilan petani masih kurang, persepsi yang berbeda mengenai hasil, petani mengalami saat kritis, lahan pertanian organik belum terlindungi, pembangunan pertanian belum terintegrasi dengan pembangunan perternakan, kegagalan menjaga kepercayaan pasar dan dukungan pemerintah yang masih kurang. Dari kondisi di atas diperlukan pendekatan perencanaan kebijakan pengembangan dengan pendekatan tujuh langkah perencanaan dari *Boothroyd* dan analisis kondisi dilakukan melalui analisa SWOT. Pendekatan perencanaan kebijakan pengembangan yang dapat disampaikan adalah : Perluasan lahan bekerjasama dengan pelanggan tetap untuk menjamin pasokan, Pemberian insentif atau kompensasi bagi para petani yang melaksanakan pertanian organik untuk pertamakalinya, Bekerjasama dengan kelompok tani semi organik untuk melakukan budidaya secara organik, Pembuatan demplot / percontohan pertanian organik, Mengintegrasikan bidang

pertanian dan peternakan, Pelatihan peningkatan ketrampilan pengolahan dan pembuatan pupuk dan pestisida alami memanfaatkan potensi lokal, Menjaga kepercayaan pasar.

Hasil penelitian Windiana (2010) yang berjudul Analisis Usahatani Padi Organik (Studi Kasus Di Desa Sumber Ngepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang) menyatakan antara lain : (1) Teknik budidaya padi organik yang dilakukan oleh petani di Desa Sumber Ngepoh kurang lebihnya sama dengan teknik budidaya padi organik yang dilakukan oleh petani-petani lain. Yaitu dengan syarat pengairan murni (air tidak terkontaminasi dengan air limbah), lahan padi organik terpisah dari lahan padi anorganik, dan input atau sarana produksi yang digunakan alami. Kegiatan pendukung untuk usahatani padi organik di Desa Sumber Ngepoh antara lain adalah adanya pelatihan-pelatihan mengenai budidaya padi organik dan pelatihan SLPHT untuk mengendalikan hama, adanya demoplot padi organik. Lembaga yang mendukung adanya usahatani padi organik di Desa Sumber Ngepoh adalah Dinas Pertanian Kabupaten Malang dan para PPL yang sering melakukan penyuluhan-penyuluhan di desa tersebut. (2) Tahun pertama (1999) penerapan usahatani padi organik produksi rata-rata sebesar 2100 kg/ha/musim GKP dengan penggunaan pupuk organik 7.000 kg/ha yang dicampur dengan urea, KCl dan ZA. Produksi menjadi 7870 kg/ha/musim GKP ditahun 2007 dengan penggunaan pupuk organik sebesar 3.500 kg/ha dan sudah tidak menggunakan pupuk kimia. (3) Pendapatan usahatani petani padi organik 6 sampai 10 tahun per musim sebesar Rp 10.077.517/hektar. Sedangkan pendapatan petani yang usahatani padi organik 0 sampai 5 tahun per musim sebesar Rp 3.794.741/hektar. Hal ini berarti bahwa pendapatan petani yang telah berusahaatani 6 sampai 10 tahun berbeda nyata dengan pendapatan petani yang berusahaatani 0 sampai 5 tahun. Untuk membuktikannya juga dilakukan uji beda rata-rata uji t. Nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak pada selang kepercayaan 95% yang berarti bahwa pendapatan petani yang berusahaatani padi organik selama 6-10 tahun berbeda nyata dengan pendapatan petani yang berusahaatani 0-5 tahun.

Aji (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Partisipasi Petani Terhadap Program Kegiatan Lumbung Pangan Masyarakat Desa dan Pengaruhnya Terhadap

Peningkatan Pendapatan Usahatani dengan menggunakan analisis Korelasi Rank-Spearman, menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh nyata antara partisipasi petani terhadap program LPMD dengan pendapatan usahatani petani. Tingkat partisipasi petani dalam program LPMD termasuk tinggi mencapai skor 47,78 dari skor maksimal 60 atau sebesar 79,63%. Jumlah tersebut terdiri dari partisipasi perencanaan dengan skor 19,57 dari skor maksimal 27 atau sebesar 72,47% termasuk dalam kategori sedang. Partisipasi dalam pelaksanaan dengan skor 23,33 dari hasil maksimal 27 atau sebesar 86,42% termasuk kategori tinggi. Partisipasi dalam tahap evaluasi dengan skor 4,88 dari hasil maksimal 6 atau sebesar 81,25% termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil analisis multinominal logit faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi petani dalam program LPMD adalah umur, tingkat pendidikan, peran pemimpin, peran penyuluh (PPL), dan letak sawah. Semakin muda umur petani, semakin tinggi tingkat pendidikan petani, semakin tinggi persepsi petani akan peran PPL serta letak sawah petani yang dekat dengan lumbung pangan maka semakin besar peluang petani untuk berpartisipasi tinggi dalam program LPMD daripada berpartisipasi rendah.

Aini (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Partisipasi Petani Tebu Desa Bendiljati Kulon Dalam Program Swasembada Gula Merah menggunakan analisis deskriptif kualitatif menyatakan bahwa partisipasi kelompok tani suko makmur dalam program swasembada gula merah di Desa Bendiljati Kulon, Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung didalam proses perencanaan kurang aktif, sedangkan dalam proses pelaksanaan aktif dan pada pemanfaatan hasil juga aktif. Faktor-faktor (Internal-Eksternal) pada partisipasi petani dalam program swasembada gula merah pada Kelompok Tani Suko Makmur Di Desa Bendiljati Kulon, Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, untuk faktor internal adalah umur, tingkat pendidikan, status sosial, luas lahan, status kepemilikan lahan, motivasi petani. Dan untuk faktor eksternal adalah modal, pasar, teknologi dan bahan baku.

Laili (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Partisipasi Petani Dalam Penerapan Teknologi Budidaya Belimbing Pada Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Blitar menggunakan analisi korelasi Rank-Spearman menyatakan bahwa kondisi sosial ekonomi di daerah penelitian sebagai

berikut; Pengalaman berusaha termasuk kategori tinggi atau 88,33% dari skor maksimal; tingkat pendidikan petani kategori sedang yaitu 60% dari skor maksimal; kontak dengan penyuluh kategori sedang yaitu 65% dari skor maksimal; luas lahan atau luas usaha petani kategori sedang yaitu 73,33% dari skor maksimal; dan status sosial petani kategori sedang yaitu 69,67% dari skor maksimal. Motivasi petani dalam menerapkan teknologi budidaya belimbing pada Program Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Blitar termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 75% dari total responden. Partisipasi petani dalam penerapan teknologi budidaya belimbing pada Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Blitar dalam tahap perencanaan termasuk dalam kategori sedang atau 74,44% dari skor maksimal. Pada tahap pelaksanaan termasuk dalam kategori tinggi atau 79,58% dari skor maksimal dan pada tahap pemanfaatan hasil termasuk kategori tinggi atau 95,56% dari skor maksimal.

Penelitian tentang dinamika partisipasi pesanggem dalam pelestarian hutan, telah dilakukan oleh Mundzir (2007) di Hutan Bambu Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara umur, jumlah tanggungan, tingkat pendapatan, dan lahan garapan dan status lahan garapan. Status kepengurusan dalam kelompok dan masa bergabung dalam organisasi terdapat tingkat partisipasi pesanggem. Sedangkan tingkat pendidikan dan luas lahan garapan tidak mempunyai hubungan dengan tingkat partisipasi pesanggem dalam pengelolaan hutan.

Mirianto (2009) dalam penelitiannya yang berjudul *Perspsi Dan Faktor Sosial Ekonomi Yang Berhubungan Dengan Keputusan Petani Padi Untuk Mengusahakan Tanaman Kelapa Sawit* dengan menggunakan metode analisis data Skoring menyebutkan bahwa persepsi petani padi terhadap inovasi usaha tanaman kelapa sawit di desa muara danau sangat positif. Untuk indikator keuntungan relatif 100% petani mengatakan tanaman kelapa sawit lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan tanaman padi. Sedangkan 98% petani menyatakan bahwa usaha tanaman kelapa sawit tidak rumit, sesuai dengan kebutuhan petani, sesuai dengan pengalaman petani, mudah untuk dilakukan, mudah untuk dicoba, serta mudah untuk dilihat hasilnya. Pada tahap *Knowledge* (pengenalan), *Persuasion*

(sikap), dan *Confirmation* (konfirmasi) tergolong tinggi, sedangkan pada tahap *Decision* (Keputusan) tergolong dalam kategori tinggi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini akan dibahas tentang evaluasi program Batu Go Organik 2012 yang ditinjau dari persepsi petani, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani, tingkat partisipasi petani, dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam pelaksanaan program Batu Go Organik 2012 untuk mengidentifikasi sejauhmana tingkat keberhasilan program yang telah berjalan. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya dibahas tentang persepsi dan faktor sosial ekonomi petani saja, partisipasi petani dalam sebuah program saja, dan pengembangan pertanian organik secara terpisah.

2.2 Pertanian Organik

2.2.1 Pengertian Pertanian Organik

Istilah produk organik bukan sesuatu yang asing bagi masyarakat, mulai dari makanan organik, sayur organik, beras organik, buah organik bahkan sampai ayam atau sapi organik. Di pasar dan supermarket kita bisa mendapatkan hasil-hasil pertanian dengan label organik. Hal ini dapat menggambarkan bahwa pertanian organik sudah memiliki pangsa pasar tersendiri. Meskipun dalam banyak hal untuk memperoleh produk organik orang harus membayar lebih mahal tidak menjadikan hambatan bagi segmentasi konsumen tertentu untuk mengkonsumsi produk organik. Pertanian organik dibanyak tempat dikenal dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang menyebut sebagai pertanian lestari, pertanian ramah lingkungan, sistem pertanian berkelanjutan dan pertanian organik itu sendiri. Penggunaan istilah pertanian organik/ "*Organik Farming* " pertama kali oleh Northbourne pada Tahun 1940 dalam bukunya yang berjudul "*Look to the Land* ". Northbourne menggunakan istilah tersebut tidak hanya berhubungan dengan penggunaan bahan organik untuk kesuburan lahan, tetapi juga kepada konsep merancang dan mengelola sistem pertanian sebagai suatu sistem utuh atau organik, mengintegrasikan lahan, tanaman panen, binatang dan masyarakat. (Scofield, 1986, Dalam Suwantoro 2008)

Sutanto (2002), mendefinisikan pertanian organik sebagai suatu sistem produksi pertanian yang berdasarkan daur ulang secara hayati. Daur ulang hara dapat melalui sarana limbah tanaman dan ternak, serta limbah lainnya yang mampu memperbaiki status kesuburan dan struktur tanah. Secara lebih luas, Sutanto (2002), menguraikan bahwa menurut para pakar pertanian Barat sistem pertanian organik merupakan "hukum pengembalian (*law of return*)" yang berarti suatu sistem yang berusaha untuk mengembalikan semua jenis bahan organik ke dalam tanah, baik dalam bentuk residu dan limbah pertanian maupun ternak yang selanjutnya bertujuan memberikan makanan pada tanaman. Filosofi yang melandasi pertanian organik adalah mengembangkan prinsip-prinsip memberikan makanan pada tanah yang selanjutnya tanah menyediakan makanan untuk tanaman (*feeding the soil that feeds the plants*) dan bukan memberi makanan langsung pada tanaman.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanian organik adalah konsep tentang pengolahan sistem pertanian yang bertujuan untuk memperbaiki tingkat kesuburan dan struktur tanah secara terpadu dengan mengintegrasikan lahan, tanaman, binatang, dan masyarakat sebagai suatu kesatuan sistem yang utuh.

2.2.2 Prinsip-prinsip Pertanian Organik

IFOAM (*International Federation of Organic Agriculture Movements*) (2005) menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan pertanian organik. Prinsip-prinsip ini berisi tentang sumbangan yang dapat diberikan pertanian organik bagi dunia, dan merupakan sebuah visi untuk meningkatkan keseluruhan aspek pertanian secara global. Pertanian merupakan salah satu kegiatan paling mendasar bagi manusia, karena semua orang perlu makan setiap hari. Nilai-nilai sejarah, budaya dan komunitas menyatu dalam pertanian. Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam pertanian dengan pengertian luas, termasuk bagaimana manusia memelihara tanah, air, tanaman, dan hewan untuk menghasilkan, mempersiapkan dan menyalurkan pangan dan produk lainnya. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut bagaimana manusia berhubungan dengan lingkungan hidup, berhubungan satu sama lain dan menentukan warisan untuk

generasi mendatang. Prinsip-prinsip tersebut mengilhami gerakan organik dengan segala keberagamannya. Prinsip – prinsip tersebut adalah :

1. Prinsip kesehatan

Pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, tanaman, hewan, manusia dan bumi sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa kesehatan tiap individu dan komunitas tak dapat dipisahkan dari kesehatan ekosistem; tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman sehat yang dapat mendukung kesehatan hewan dan manusia. Kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem kehidupan. Hal ini tidak saja sekedar bebas dari penyakit, tetapi juga dengan memelihara kesejahteraan fisik, mental, sosial dan ekologi. Ketahanan tubuh, keceriaan dan pembaharuan diri merupakan hal mendasar untuk menuju sehat. Peran pertanian organik baik dalam produksi, pengolahan, distribusi dan konsumsi bertujuan untuk melestarikan dan meningkatkan kesehatan ekosistem dan organisme, dari yang terkecil yang berada di dalam tanah hingga manusia. Secara khusus, pertanian organik dimaksudkan untuk menghasilkan makanan bermutu tinggi dan bergizi yang mendukung pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan. Mengingat hal tersebut, maka harus dihindari penggunaan pupuk, pestisida, obat-obatan bagi hewan dan bahan aditif makanan yang dapat berefek merugikan kesehatan.

2. Prinsip ekologi

Pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Bekerja, meniru dan berusaha memelihara sistem dan siklus ekologi kehidupan. Prinsip ekologi meletakkan pertanian organik dalam sistem ekologi kehidupan. Prinsip ini menyatakan bahwa produksi didasarkan pada proses dan daur ulang ekologis. Makanan dan kesejahteraan diperoleh melalui ekologi suatu lingkungan produksi yang khusus; sebagai contoh, tanaman membutuhkan tanah yang subur, hewan membutuhkan ekosistem peternakan, ikan dan organisme laut membutuhkan lingkungan perairan. Budidaya pertanian, peternakan dan pemanenan produk liar organik haruslah sesuai dengan siklus dan keseimbangan ekologi di alam. Siklus-siklus ini bersifat universal tetapi pengoperasiannya bersifat spesifik-lokal. Pengelolaan organik harus disesuaikan dengan kondisi, ekologi, budaya dan skala lokal. Bahan-bahan asupan sebaiknya dikurangi dengan

cara dipakai kembali, didaur ulang dan dengan pengelolaan bahan-bahan dan energi secara efisien guna memelihara, meningkatkan kualitas dan melindungi sumber daya alam. Pertanian organik dapat mencapai keseimbangan ekologis melalui pola sistem pertanian, membangun habitat, pemeliharaan keragaman genetika dan pertanian. Mereka yang menghasilkan, memproses, memasarkan atau mengkonsumsi produk-produk organik harus melindungi dan memberikan keuntungan bagi lingkungan secara umum, termasuk di dalamnya tanah, iklim, habitat, keragaman hayati, udara dan air.

3. Prinsip keadilan

Pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama. Keadilan dicirikan dengan kesetaraan, saling menghormati, berkeadilan dan pengelolaan dunia secara bersama, baik antar manusia dan dalam hubungannya dengan makhluk hidup yang lain. Prinsip ini menekankan bahwa mereka yang terlibat dalam pertanian organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan; seperti petani, pekerja, pemroses, penyalur, pedagang dan konsumen. Pertanian organik harus memberikan kualitas hidup yang baik bagi setiap orang yang terlibat, menyumbang bagi kedaulatan pangan dan pengurangan kemiskinan. Pertanian organik bertujuan untuk menghasilkan kecukupan dan ketersediaan pangan maupun produk lainnya dengan kualitas yang baik. Prinsip keadilan juga menekankan bahwa ternak harus dipelihara dalam kondisi dan habitat yang sesuai dengan sifat-sifat fisik, alamiah dan terjamin kesejahteraannya. Sumber daya alam dan lingkungan yang digunakan untuk produksi dan konsumsi harus dikelola dengan cara yang adil secara sosial dan ekologis, dan dipelihara untuk generasi mendatang. Keadilan memerlukan sistem produksi, distribusi dan perdagangan yang terbuka, adil, dan mempertimbangkan biaya sosial dan lingkungan yang sebenarnya.

4. Prinsip perlindungan.

Pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup. Pertanian organik merupakan suatu sistem yang hidup dan

dinamis yang menjawab tuntutan dan kondisi yang bersifat internal maupun eksternal. Para pelaku pertanian organik didorong meningkatkan efisiensi dan produktifitas, tetapi tidak boleh membahayakan kesehatan dan kesejahteraannya. Maka, harus ada penanganan atas pemahaman ekosistem dan pertanian yang tidak utuh. Prinsip ini menyatakan bahwa pencegahan dan tanggung jawab merupakan hal mendasar dalam pengelolaan, pengembangan dan pemilihan teknologi di pertanian organik. Ilmu pengetahuan diperlukan untuk menjamin bahwa pertanian organik bersifat menyehatkan, aman dan ramah lingkungan. Tetapi pengetahuan ilmiah saja tidaklah cukup. Seiring waktu, pengalaman praktis yang dipadukan dengan kebijakan dan kearifan tradisional menjadi solusi tepat. Pertanian organik harus mampu mencegah terjadinya resiko merugikan dengan menerapkan teknologi tepat guna dan menolak teknologi yang tak dapat diramalkan akibatnya, seperti rekayasa genetika (*genetic engineering*). Segala keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai dan kebutuhan dari semua aspek yang mungkin dapat terkena dampaknya, melalui proses-proses yang transparan dan partisipatif.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa prinsip-prinsip pertanian organik adalah dasar/ filosofi yang menjadi landasan pertanian organik, adapun prinsip-prinsip tersebut harus menuju kepada beberapa aspek antara lain ; prinsip kesehatan yang harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, prinsip ekologi yang bertujuan untuk mempertahankan aspek keseimbangan ekologis, prinsip keadilan agar memastikan adanya aspek keadilan bagi semua yang terlibat dalam penerapan pertanian organik, prinsip perlindungan yang mendasari pencegahan aspek merugikan bagi kesehatan dan kesejahteraan pada masa mendatang.

2.2.3 Pentingnya Pengembangan Pertanian Organik

Revolusi hijau sudah membuktikan mampu menyediakan kebutuhan pangan bagi dunia. Kita tidak dapat memungkiri jasa yang besar tersebut tetapi juga tidak boleh terus-menerus mengandalkan revolusi hijau untuk penyediaan pangan dunia. Revolusi hijau ternyata membawa dampak negatif bagi lingkungan. Pupuk dan obat-obatan kimia yang digunakan telah mematikan tanah dan merusak ekologi. Ada begitu banyak kehidupan di dalam tanah yang mati, yang berguna

untuk menyuburkan tanah. Predator hama ikut mati sehingga ketergantungan terhadap pestisida semakin besar. Bahkan obat-obatan tersebut juga berbahaya bagi para pelaku pertanian. Satu hal yang terpenting, pertanian semaju apapun sangat tergantung kepada perilaku alam sekitar. Dengan teknologi yang tepat ketergantungan ini dapat dikurangi tetapi tidak dapat dihilangkan.

Fakta ini yang menurut Notohadiningrat (1993) yang membedakan antara pertanian dengan industri lain. Karena tergantung pada lingkungan alam, suatu kemunduran atau kerusakan lingkungan alam karena penggunaan salah akan langsung berbalik berdampak merugikan bagi pertanian. Produk pertanian yang dihasilkan membawa akibat buruk bagi kesehatan konsumennya. Revolusi hijau semakin menghilangkan kemandirian petani. Dalam memenuhi kebutuhan pertanian, petani harus mengeluarkan begitu banyak sumber kapital/ dana. Usaha pertanian yang dikerjakan belum secara signifikan mensejahterakan petani sehingga minat generasi muda untuk menekuni bidang pertanian terus turun dari waktu ke waktu. Revolusi hijau tidak ramah lingkungan dan sosial karena dikembangkan dalam sistem kapitalisme. Pertanian organik dinilai sebagai sistem pertanian yang mampu menyediakan ketersediaan pangan secara berkelanjutan karena ramah lingkungan.

Pertanian organik tidak identik dengan pertanian tradisional. Dalam menjalankan pertanian organik, petani dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Para petani sudah kehilangan beberapa kearifan lokal sebagai ilmu pengetahuan yang penting karena sudah sekian lama dikondisikan melakukan pertanian konvensional. Pengetahuan lokal tentang mengelola dan memproduksi pupuk tidak lagi dikuasai para petani. Sumber daya lokal berupa material yang tersedia melimpah sebagai bahan pupuk organik tidak lagi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Para petani tidak lagi membenihkan sendiri bibit padi yang akan mereka tanam. Memelihara keseimbangan antara musuh alami dan hama tidak lagi merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan.

Pertanian Organik pada dasarnya mempunyai kecintaan dan perhatian yang tinggi terhadap lingkungan. Bagi seorang petani tanah yang subur dan sehat di mana terdapat populasi mikroba yang sesuai untuk terjadinya siklus nutrient adalah hal yang sangat berharga. Dengan demikian sudah saatnya dikembangkan

strategi pertanian yang baru. Strategi pertanian yang mampu memberikan perlindungan kepada lingkungan dan kehidupan masa depan manusia. Strategi baru tersebut bukan sekedar dalam aspek teknik dan metode bertani, melainkan juga cara pandang, sistem nilai, sikap dan keyakinan hidup. Strategi pertanian yang mendasarkan pada prinsip-prinsip hukum alam. Alam dipandang secara menyeluruh, dimana komponennya saling tergantung dan menghidupi, dimana manusia juga adalah bagian di dalamnya. Pertanian organik dinilai sebagai strategi pertanian yang mampu menjawab tantangan di atas. Strategi pertanian yang mampu menyediakan ketersediaan pangan secara berkelanjutan karena ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Untuk itu kesadaran masyarakat secara umum akan pentingnya mengkonsumsi produk-produk organik perlu ditingkatkan melalui berbagai cara. Demikian pula halnya dengan para pelaku dunia usaha pertanian untuk dapat melakukan kegiatan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selanjutnya produk pertanian organik pantas dihargai lebih tinggi bukan karena para petani sudah menghasilkan bahan pangan melainkan lebih sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih kepada para petani yang telah menjaga kelestarian lingkungan.

2.3 Evaluasi

2.3.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000 : 220 Dalam Yunanda : 2009). Sedangkan menurut pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan” (Yunanda : 2009).

Pemahaman mengenai pengertian evaluasi dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Menurut

Stufflebeam dalam Lababa (2008), evaluasi adalah "the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives," Artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Masih dalam Lababa (2008), Worthen dan Sanders mendefinisikan "evaluasi sebagai usaha mencari sesuatu yang berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu".

Tague-Sutcliffe (1996 : 1-3), mengartikan evaluasi sebagai "a systematic process of determining the extent to which instructional objective are achieved by pupils". Evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas.

Dari definisi evaluasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program.

Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan antara pengukuran dan penilaian saling berkaitan. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran atau kriteria tertentu (meter, kilogram, takaran dan sebagainya), pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian berarti menilai sesuatu. Sedangkan menilai itu mengandung arti, mengambil keputusan terhadap sesuatu yang berdasarkan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya. Dan penilaian bersifat kualitatif. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Arikunto (2009 : 3) bahwa mengukur adalah ,membandingkan sesuatu dengan satu ukuran (bersifat kuantitatif), menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk (bersifat kualitatif), dan evaluasi meliputi kedua langkah tersebut di atas.

Menurut Djaali dan Pudji (2008 : 1), evaluasi dapat juga diartikan sebagai "proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang

dievaluasi”. Sedangkan Ahmad (2007 : 133), mengatakan bahwa “evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, obyek,dll.) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian”.

Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria namun dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkannya dengan kriteria. Dengan demikian evaluasi tidak selalu melalui proses mengukur baru melakukan proses menilai tetapi dapat pula evaluasi langsung melalui penilaian saja. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Crawford (2000 : 13), mengartikan penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/ menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat ditarik benang merah tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. “Efektifitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses” (Sudharsono *dalam* Lababa, 2008). Jadi evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula.

2.3.2 Jenis-jenis Evaluasi

Departemen Pertanian *dalam* Hendrawan (2009) mengemukakan jenis evaluasi untuk mengevaluasi suatu program, yaitu:

1. Evaluasi Input

Evaluasi input adalah penilaian terhadap kesesuaian antara input-input program dengan tujuan program. Input adalah semua jenis barang, jasa, dana, tenaga manusia, teknologi dan sumberdaya lainnya, yang perlu tersedia untuk terlaksananya suatu kegiatan dalam rangka menghasilkan Output dan tujuan suatu proyek atau program.

2. Evaluasi Output

Evaluasi Output adalah penilaian terhadap Output-Output yang dihasilkan oleh program. Output adalah produk atau jasa tertentu yang diharapkan dapat dihasilkan oleh suatu kegiatan dari input yang tersedia, untuk mencapai tujuan proyek atau program. Contoh Output adalah perubahan pengetahuan (aras kognitif), perubahan sikap (aras afektif), kesediaan berperilaku (aras konatif) dan perubahan berperilaku (aras psikomotorik). Aras kognitif adalah tingkat pengetahuan seseorang. Aras afektif adalah kecenderungan sikap seseorang yang dipengaruhi oleh perasaannya terhadap suatu hal. Aras konatif adalah kesediaan seseorang berperilaku tertentu yang dipengaruhi oleh sikapnya terhadap suatu hal. Aras tindakan adalah perilaku seseorang yang secara nyata diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari sehingga dapat diwujudkan menjadi suatu pola.

3. Evaluasi *Effect* (Efek)

Evaluasi efek adalah penilaian terhadap hasil yang di peroleh dari penggunaan Output-Output program. Sebagai contoh adalah efek yang dihasilkan dari perubahan perilaku peserta suatu penyuluhan. Efek biasanya sudah mulai muncul pada waktu pelaksanaan program namun efek penuhnya baru tampak setelah program selesai.

4. Evaluasi *Impact* (Dampak)

Evaluasi *Impact* adalah penilaian terhadap hasil yang diperoleh dari efek proyek yang merupakan kenyataan sesungguhnya yang dihasilkan oleh proyek pada tingkat yang lebih luas dan menjadikan proyek jangka panjang. Evaluasi dapat dipergunakan dengan penggunaan penilaian yang kualitatif.

2.3.3 Tujuan dan Fungsi Evaluasi

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002 : 13), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen.

Menurut Crawford (2000 ; 30), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah : (1) Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan. (2) Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil. (3) Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan. 4. untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/ membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis.

Menurut Kelsey dan Hearne (1955) dalam Mugniesyah (2006), evaluasi program bermanfaat antara lain untuk: (1) Menguji secara berkala pelaksanaan program, yang mengarahkan perbaikan kegiatan yang berkelanjutan, (2) Membantu memperjelas manfaat yang penting dan tujuan-tujuan khusus program serta memperjelas dan mengukur sampai seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu tercapai, (3) Menjadi pengukur keefektifan metode pelatihan, (4) Menyediakan data dan informasi tentang situasi pedesaan yang penting untuk perencanaan program selanjutnya, dan (5) Menyediakan bukti tentang nilai atau pentingnya program.

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan, yaitu:

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan (Wahab, 2002: 51).

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri yaitu:

1. *Measurement*, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukur yang relevan.
2. *Test*, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. *Assessment*, Suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan (Dunn dalam Hendrawan 2009).

2.4 Program

2.4.1 Pengertian Program

Program adalah cara yang dipisahkan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini mudah dipahami, karena program itu sendiri menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan program tersebut. Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek, yang antara lain adalah:

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai
2. Adanya kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam pencapaian tujuan itu
3. Adanya aturan-aturan yang dipegang dengan prosedur yang harus dilalui
4. Adanya perkiraan anggaran yang perlu atau dibutuhkan

5. Adanya strategi dalam pelaksanaan

Unsur keduanya yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program adalah adanya kelompok orang yang menguji sasaran program sehingga kelompok orang tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Bila tidak memberikan manfaat pada kelompok orang maka boleh dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperationalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. *"A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives"* (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integrasi untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.

Menurut (Charles O. Jones dalam Simamora 2012), pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya jugadi identifikasikan melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295 dalam Simamora 2012).

2.4.2 Pelaksanaan Program

Untuk dapat memahami pengertian dari pelaksanaan, Wahab (1991:51), merumuskan pengertian pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Berhasil tidaknya suatu program dilaksanakan tergantung dari unsur pelaksanaannya. Unsur pelaksana itu merupakan unsur ketiga. Pelaksana penting artinya karena pelaksanaan suatu program, baik itu organisasi ataupun perseorangan bertanggung jawab dalam pengelola maupun pengawasan dalam pelaksanaan.

2.4.3 Tolak Ukur Evaluasi Program

Suatu program dapat dievaluasi apabila ada tolak ukur yang bisa dijadikan penilaian terhadap program yang telah berlangsung, berhasilnya atau tidak berhasilnya suatu program berdasarkan tujuan yang sudah tentu memiliki tolak ukur yang nantinya harus dicapai dengan baik oleh sumber daya yang mengelolanya.

Adapun yang menjadi tolak ukur dalam evaluasi suatu program adalah:

1. Apakah hasil suatu proyek sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
2. Ketersediaan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Apakah sarana atau kegiatan benar-benar dapat dicapai atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan.
4. Apakah sarana yang disediakan benar-benar dilakukan untuk tujuan semula.
5. Berapa persen jumlah atau luas sasaran sebenarnya yang dapat dijangkau oleh program.
6. Bagaimana mutu pekerjaan atau sasaran yang dihasilkan oleh program (kualitas hidup, kualitas barang).
7. Berapa banyak sumber daya dan kegiatan yang dilakukan benar-benar dimanfaatkan secara maksimal.

8. Apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan masukan terhadap perubahan yang diinginkan.

2.5 Perubahan Perilaku

Hasil yang diharapkan dari penyuluhan adalah adanya perubahan perilaku dari sasaran/petani. Perubahan perilaku petani melalui pendidikan adalah proses perkembangan dirinya sebagai individu, hingga memungkinkan dirinya berpartisipasi dalam kehidupan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Perkembangan dan penambahan pengetahuan serta peningkatan keterampilan yang telah diperolehnya, serta perubahan sikap dilakukannya, namun demikian perubahan perilaku belum dimungkinkan apabila tidak tersedia material lokal untuk mewujudkan pengetahuan baru dalam praktek.

Oleh karena perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya serta tersedianya material untuk menerapkan teknologi. Oleh sebab itu, penyuluhan pertanian bertujuan untuk memberikan motivasi pada petani ke arah perubahan perilakunya, melalui usaha perubahan sikap baru, memberikan pengetahuan baru, melatih keterampilan, dalam kegiatan usahatani, perlu menyediakan material baru, misalnya bibit unggul, traktor, pupuk bagi petani.

Dengan adanya perubahan-perubahan perilaku dari masing-masing petani diharapkan petani akan lebih terbuka menerima anjuran-anjuran, petunjuk dan bimbingan yang akan menguntungkan dalam usahatani. Perubahan-perubahan itu antara lain:

1. Pengetahuan petani terutama dalam ilmu-ilmu teknik pertanian dan usahatani.
2. Kecakapan dan keterampilan dalam mengelola usahatani agar lebih efisien dan efektif
3. Sikap yang lebih progresif dan dinamis serta memotivasi tindakan yang rasional.

2.5.1 Pengertian Perilaku

Persepsi seseorang terhadap sesuatu akan dipengaruhi faktor fungsional, struktural dan perhatian. Kemudian setiap individu akan mengevaluasi kenyataan

yang ada, maka akan timbul apa yang disebut perilaku. Perilaku seseorang dibangun dari tiga komponen yaitu sikap, ketrampilan dan pengetahuan.

Perilaku merupakan kelakuan yang mencerminkan seseorang yang selalu menuju kearah tujuan (Radiastuti, 2003). Perilaku manusia merupakan perilaku sosial yang mempunyai tujuan tertentu dengan jelas, artinya perilaku harus mempunyai arah bagi pihak-pihak yang terlibat, kemudian berorientasi terhadap perilaku yang sama dengan pihak lain. Hal yang paling penting dari perilaku adalah maksud dan tujuan. Perilaku seseorang akan dibentuk oleh akumulasi dari ketiga kawasan, yaitu kawasan sikap (afektif), pengetahuan (kognitif) dan ketrampilan (psikomotorik). Ketiga kawasan itulah yang nantinya akan membentuk dan mempengaruhi perilaku seseorang terhadap suatu inovasi.



Gambar 1. Tingkat Perubahan Perilaku

Menurut Taksonomi Bloom perilaku seseorang akan dibentuk oleh akumulasi dari ketiga kawasan, yaitu:

1. Pengetahuan (kognitif)
 - a. Pengetahuan

Kemampuan untuk mengenali dan mengingat (*recall*) informasi yang telah diterima sebelumnya, seperti misalnya definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dsb.

b. Pemahaman

Dikenali dari kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan/informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Diharapkan bisa menyebutkan kembali apa yang didengar dengan kata-katanya sendiri.

c. Aplikasi

Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari kedalam situasi atau konteks lain atau yang baru.

d. Analisis

Kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan dan membedakan, komponen/elemen suatu fakta atau konsep/pendapat/asumsi/hipotesis dan memeriksa setiap komponen untuk melihat ada tidaknya kontradiksi.

e. Sintesis

Mampu mengkombinasikan bagian atau elemen ke dalam satu kesatuan atau struktur yang lebih besar.

f. Evaluasi

Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian dan keputusan terhadap gagasan, metode, produk dengan menggunakan kriteria tertentu.

2. Ketrampilan (psikomotorik)

a. Persepsi

Penggunaan alat indera untuk menjadi pegangan dalam membantu gerakan.

b. Kesiapan

Kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan.

c. Respon Terpimpin

Tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks, termasuk di dalamnya imitasi dan gerakan coba-coba.

d. Mekanisme

Membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil dengan meyakinkan dan cakap.

e. Respon Kompleks

Gerakan motoris yang terampil yang di dalamnya terdiri dari pola-pola gerakan yang kompleks.

f. Penyesuaian

Keterampilan yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dalam berbagai situasi.

g. Penciptaan

Membuat pola gerakan baru yang disesuaikan dengan situasi atau permasalahan tertentu.

3. Sikap (afektif)

a. Penerimaan

Kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya. Dalam pengajaran bentuknya berupa mendapatkan perhatian, mempertahankannya, dan mengarahkannya.

b. Tanggapan

Memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya. Meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan.

c. Penghargaan

Berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena, atau tingkah laku. Penilaian berdasar pada internalisasi dari serangkaian nilai tertentu yang diekspresikan ke dalam tingkah laku

d. Pengorganisasian

Memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di antaranya, dan membentuk suatu sistem nilai yang konsisten.

e. Karakterisasi berdasarkan nilai

Memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah-lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya-hidupnya.

Perilaku manusia merupakan perilaku sosial yang mempunyai tujuan tertentu. Dari gambar diatas, perilaku diuraikan menjadi tiga kawasan, diantaranya: pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Perkembangan pengetahuan

seseorang terjadi melalui tiga tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya:

1. Tahap individu melakukan aktifitas dalam usaha memahami lingkungan
2. Tahap individu mulai melihat dunia melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal
3. Tahap simbolik, dimana mereka mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi bahasa dan logika.

Pengetahuan seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Sikap seseorang merupakan keadaan internal yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya terhadap suatu subyek atau kejadian disekitarnya. Sikap merupakan bentuk hasil belajar tersendiri yang selalu diharapkan didalam suatu proses belajar, meskipun untuk mempelajarinya di perlukan waktu yang relatif lama, karena komponen sikap terdiri dari beberapa hal, diantaranya pengetahuan, efek dan tingkah laku yang ditentukan oleh situasi pada saat tertentu dan dapat saja tidak konsisten dengan sikap yang sesungguhnya.

Keterampilan seseorang merupakan hasil belajar yang berhubungan dengan gerakan otot, dan pada umumnya merupakan salah satu tujuan utama program pengajaran. Meskipun ketrampilan belajar, seperti ketrampilan intelektual, informasi verbal, pengetahuan dan sikap. Dengan demikian perilaku merupakan akumulasi dari ketiga hal, diantaranya pengetahuan, sikap dan ketrampilan.

Menurut Weber dalam Soekanto (1985) perilaku manusia merupakan perilaku sosial yang harus mempunyai tujuan tertentu yang berwujud dengan jelas. Artinya, perilaku itu harus mempunyai arti bagi pihak-pihak yang terlibat yang kemudian berorientasi terhadap perilaku yang sama dengan pihak lain.

Menurut Gibson, et al (1996) perilaku merupakan semua yang dilakukan seseorang. Serta secara teori disepakati bahwa:

1. Perilaku adalah akibat.
2. Perilaku diarahkan oleh tujuan.
3. Perilaku yang bisa diamati dapat diukur.

4. Perilaku yang tidak dapat secara langsung diamati (misalnya, berpikir dan mengawasi) juga penting dalam mencapai tujuan.
5. Perilaku dimotivasi/didorong.

Anas (1996) mengemukakan perilaku terdiri dari tiga aspek yaitu:

1. Aspek kognitif yaitu berhubungan dengan kegiatan otak berupa proses berfikir mengenai suatu obyek tertentu.
2. Aspek afektif yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi dengan cara tertentu.
3. Aspek psikomotorik yaitu aspek yang berhubungan dengan keterampilan (skill) seseorang setelah dia menerima pengalaman belajar tertentu.

Weber mengingatkan, bahwa tidak terdapat pemisahan yang kaku antara perilaku yang berarti dengan perilaku yang tidak bertujuan (Soekanto, 1985). Pemahaman mengenai perilaku memiliki arti penting sebab pada dasarnya tujuan dari penyuluhan pertanian adalah untuk mengubah perilaku kearah yang lebih baik atau dengan kata lain better farming, better bussiness dan better living. Penyuluhan pertanian secara deskriptif merupakan pendidikan non formal yang bertujuan untuk membentuk persepsi, sikap dan perilaku (keterampilan) petani melalui proses komunikasi. Adapun tujuan dari penyuluhan antara lain: menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan kecakapan untuk bertindak dan meningkatkan sikap dan tanggapan positif terhadap inovasi-inovasi.

Ketiga aspek perilaku tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Pengetahuan

Pengetahuan adalah aspek kognitif yang ada pada diri manusia. Pengetahuan diawali dari proses berpikir dalam diri manusia. Pengetahuan terkait dengan apa yang diketahui oleh manusia. Pengetahuan dan cakupannya memberikan arti terhadap obyek psikologisnya (Gibson, et al, 1996). Pengetahuan juga merupakan segala sesuatu hal yang diketahui oleh petani tentang suatu inovasi baru.

B. Sikap

Sikap merupakan aspek afektif dari perilaku yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengikutsertakan diri secara aktif dalam fenomena

tertentu dan membuat reaksi dengan cara tertentu pula. Sikap adalah perasaan, pikiran dan kecenderungan seseorang yang bersifat relatif permanen mengenai aspek-aspek tertentu di dalam lingkungan. Komponen-komponen sikap adalah pengetahuan, perasaan dan kecenderungan evaluatif terhadap suatu obyek atau subyek yang memiliki konsekuensi dengan bagaimana seseorang berhadapan dengan obyek sikap (Van den Ban, 1999)

Robbins (2003) mengemukakan bahwa sikap adalah pernyataan atau pertimbangan evaluatif mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu.

Menurut Ahmadi (2007) sikap adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata dalam kegiatan-kegiatan sosial. Sikap merupakan konsep yang membantu kita untuk memahami tingkah laku. Dimana fungsi sikap dapat dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

1. Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri.
2. Sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku.
3. Sikap berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman-pengalaman.
4. Sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian.

Sikap adalah determinan perilaku sebab, sikap berkaitan dengan persepsi, kepribadian, dan motivasi. Sebuah sikap adalah perasaan positif atau negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan, dipelajari, dan diatur melalui pengalaman, yang memberikan pengaruh khusus pada respon seseorang terhadap orang, obyek-obyek, dan keadaan (Gibson, et al, 1996).

Manusia tidak dilahirkan dengan sikap pandangan ataupun sikap perasaan tertentu, tetapi sikap-sikap tersebut dibentuk sepanjang perkembangannya. Sikap di dalam kehidupan manusia mempunyai peranan besar sebab apabila sudah dibentuk pada diri manusia, maka sikap-sikap itu akan turut menentukan cara-cara tingkah lakunya terhadap obyek-obyek sikapnya. Menurut Gerungan (1999) menyebutkan beberapa ciri-ciri sikap, yaitu:

- a. Sikap bukan dibawa orang sejak ia dilahirkan, melainkan dibentuk atau dipelajarinya sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan obyeknya.

- b. Sikap dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari. Sikap dapat berubah bila terdapat keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah berubahnya sikap pada orang itu.
- c. Sikap tidak berdiri sendiri tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu obyek. Sikap itu terbentuk, dipelajari atau berubah berkenaan dengan suatu obyek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.
- d. Obyek sikap dapat merupakan satu hal, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.
- e. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah yang membedakan sikap dari kecakapan atau pengetahuan yang dimiliki seseorang.

Pada dasarnya sikap merupakan kecenderungan berperilaku dan hal ini ditunjukkan dengan pernyataan suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang.

C. Keterampilan

Menurut Gibson, et al (1996) keterampilan adalah kompetensi yang berhubungan dengan pekerjaan. Aspek ketiga dari perilaku adalah aspek psikomotorik yang berkaitan dengan keterampilan seseorang setelah menerima pengalaman belajar tertentu, merupakan kecakapan atas kemampuan untuk menerapkan suatu inovasi. Bagaimana petani dapat mengulang segala sesuatu yang dilihatnya melalui kegiatan belajar dengan menirukan gerak, menggunakan konsep-konsep untuk melakukan gerak, melakukan dengan benar dan melakukan beberapa gerakan dengan benar dan wajar.

Sehingga respon petani dapat dikatakan positif apabila terjadi peningkatan pada pengetahuan, keterampilan dan sikap. Dimana pengetahuan dikatakan meningkat apabila terjadi perubahan dari tidak tahu menjadi tahu dan yang sudah tahu menjadi lebih tahu, sikap dikatakan meningkat apabila terjadi perubahan dari tidak mau menjadi mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan. Sedangkan keterampilan dikatakan meningkat apabila terjadi perubahan dari tidak mampu menjadi mampu melakukan suatu pekerjaan bermanfaat.

Sutarmadi dalam Mardikanto (1989) mengemukakan bahwa penyuluhan pertanian yang terutama ditujukan kepada petani dan keluarganya pada dasarnya

dimaksudkan untuk mengubah, dalam arti agar mereka memiliki dan dapat meningkatkan perilakunya, mengenai:

- a. Sikap yang lebih progresif dan motivasi mengenai tindakan yang lebih rasional.
- b. Pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu-ilmu pertanian dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan keterampilan teknis berusaha tani yang lebih baik.

2.5.2 Konsep Perubahan Perilaku

Kegiatan pertanian pada masyarakat desa terutama petani akan selalu mempengaruhi kehidupan baik secara segi sosial, kebudayaan, ekonomi, keagamaan dan lain-lain. Akan tetapi sebagian besar akan mempengaruhi pada sosial ekonomi mereka. Karena kedua hal tersebut dapat dilihat secara nyata pada kehidupan sehari-hari.

Permasalahan yang menyangkut petani antara lain bagaimana mengubah atau meningkatkan perilakunya dalam menuntut kemajuan, seperti bagaimana meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, meningkatkan semangat dan gairah kerjanya, meningkatkan efisiensi segenap usahanya serta lainnya, yang secara ringkas dapat dirumuskan sebagai terus menerus menciptakan perubahan-perubahan sosial atau struktur sosial terhadapnya. Sementara itu, pola kebijakan penguasa atau pejabat itu tidak diikuti atau diikuti secara setengah-setengah. Disebabkan karena tidak atau kurang sesuai dengan keinginan dan harapan para petani sendiri atau karena merupakan hal yang terlalu baru, sehingga petani belum mempunyai keyakinan sepenuhnya atas kemanfaatan pola kebijaksanaan tersebut. Dalam hal ini berkaitan dengan sifat khusus dari petani yaitu ketergantungannya atau keterikatannya pada tradisi (Soedarmanto, 2003).

Sifat keterikatan pada tradisi itu merupakan masalah penting, karena dalam suatu pembangunan desa untuk menciptakan perubahan sosial atau struktur sosial. Selain itu, untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi dan dalam hal usahatani yaitu senantiasa mengadakan perubahan-perubahan sehingga usahatannya mengalami keuntungan. Sehingga akan timbul pertanyaan unsur apa yang sesuai untuk diterapkan yang pada akhirnya dapat menggerakkan perubahan-

perubahan perilaku petani dan sekaligus mengakibatkan pola usahatannya makin maju dan menguntungkan.

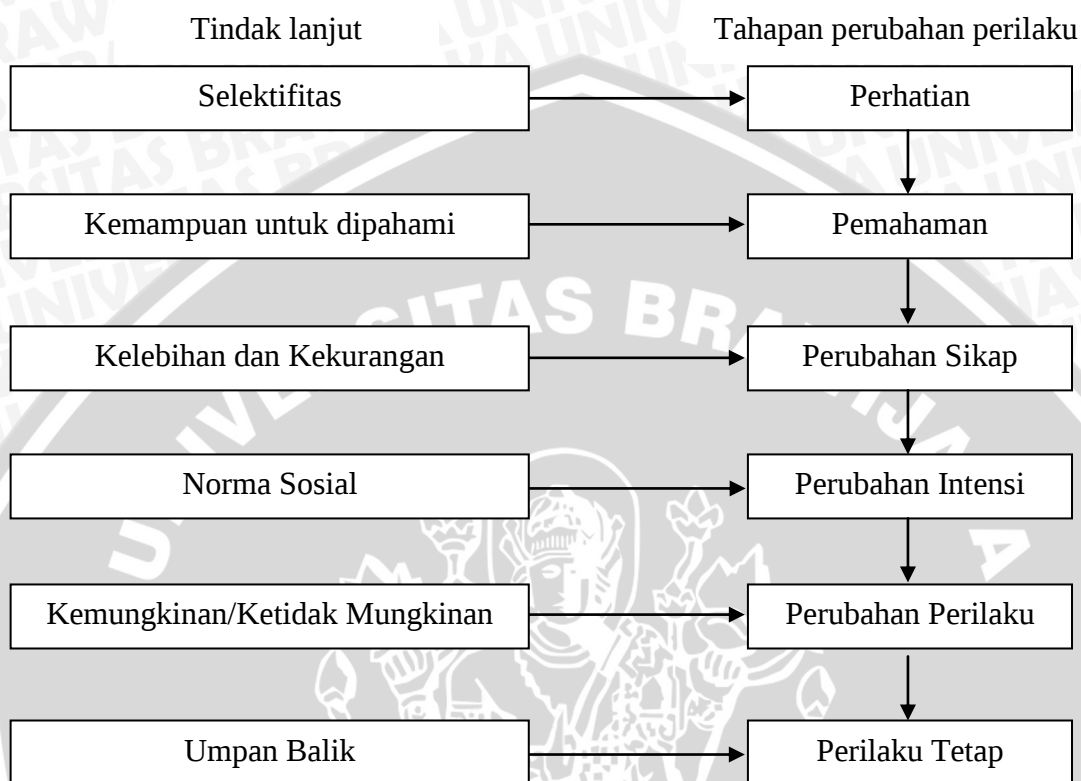
Van den Ban dan Hawkins (1999) berpendapat sikap dapat didefinisikan sebagai perasaan, pikiran, dan kecenderungan yang kurang lebih bersifat permanen mengenai aspek-aspek tertentu dalam lingkungannya. Komponen-komponen sikap adalah pengetahuan, perasaan-perasaan dan kecenderungan untuk bertindak. Tiap-tiap sikap mempunyai tiga aspek, yaitu:

1. Aspek kognitif, yaitu yang berhubungan dengan gejala mengenal pikiran. Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman, dan keyakinan, serta harapan-harapan individu tentang obyek atau kelompok obyek tertentu.
2. Aspek afektif berwujud proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antisipasi, dan sebagainya yang bertujuan kepada obyek tertentu.
3. Aspek konatif berwujud proses tendensi atau kecenderungan untuk berbuat sesuatu obyek.

Ketiga komponen ini saling berhubungan dan berkaitan, namun merupakan interaksi dari komponen-komponen secara kompleks. Melalui komponen kognisi akan timbul ide dan konsep mengenai apa yang dilihat. Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki pribadi seseorang akan terjadi keyakinan terhadap obyek tersebut. Pada tahap berikutnya komponen afeksi memberikan evaluasi emosional (senang atau tidak senang) terhadap obyek. Selanjutnya komponen konasi menentukan kesiapan jawaban berupa tindakan terhadap suatu obyek.

Atas dasar tindakan ini maka situasi yang semula tidak seimbang menjadi seimbang. Keseimbangan dalam situasi ini berarti bahwa antara obyek yang dilihat sesuai dengan peningkatannya dimana unsur, nilai dan norma dirinya dapat menerima secara rasional dan emosional. Jika situasi ini tidak tercapai maka individu menolak dan reaksi yang timbul adalah sikap apatis, acuh tak acuh, atau menentang sampai ekstrim yaitu memberontak. Sehingga terjadinya keseimbangan akan melalui perubahan sikap dimana tiap komponen akan mengolah masalahnya secara baik.

Sikap dapat mempengaruhi perubahan perilaku. Van den Ban dan Hawkins (1999) menggambarkan model perubahan perilaku melalui sikap sebagai berikut:



Gambar 2. Perubahan Perilaku Melalui Sikap

(Sutarmadi, 1977 dalam Markadianto dan Sutami, 1986) mengemukakan bahwa penyuluhan pertanian yang terutama ditujukan kepada petani dan keluarganya pada dasarnya dimaksudnya untuk mengubah dalam arti agar mereka memiliki dan dapat meningkatkan perilakunya mengenai pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Awalnya petani hanya mengetahui saja, kemudian mereka mau menerima ide-ide baru memerlukan tahapan dan waktu yang relatif lama. Suatu keputusan untuk melakukan perubahan dari yang semula hanya mengetahui sampai sadar dan mengubah sikapnya untuk melaksanakan ide baru tersebut, biasanya juga merupakan hasil dari urutan-urutan kejadian dan pengaruh-pengaruh tertentu dari dimensi waktu. Melalui proses komunikasi, diharapkan terjadi perubahan perilaku kepada masyarakat.

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang di indera oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera. Dengan kata lain persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. Persepsi merupakan keadaan *integrated* dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi.

Persepsi pada dasarnya adalah proses kognitif yang dialami seseorang dalam memahami informasi tentang dunia atau lingkungan melalui penglihatan, penghayatan dan lain-lain. Persepsi setiap orang itu berbeda karena sebagai makhluk individu setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pemahamannya. Bertambah tinggi pengetahuan dan pemahaman seseorang pada objek yang di persepsi maka baik pula bentuk persepsi orang tersebut terhadap objek. Persepsi juga merupakan suatu proses pemahaman terhadap apa yang terjadi dilingkungan orang yang sedang berpersepsi. Hubungan antara lingkungan dengan manusia dan tingkah lakunya adalah hubungan timabal balik saling terkait dan saling mempengaruhi. Beberapa pengertian persepsi yang diberikan oleh para ahli :

Willliem James *dalam* Adi (1994) menyatakan bahwa persepsi adalah terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh panca indera dari pengalaman ingatan (memori) kita dan diolah kemabali berdasarakan pengalaman yang kita miliki.

Sarwono (1995) menyatakan bahwa persepsi merupakan hasil hubungan antar manusia dengan lingkungan kemudian diproses dalam alam kesadaran (kognbisi) yang dipengaruhi memori tentang pengalaman tentang masa lampau, minat, sikaf, intelegensi, dimana hasil penelitian terhadap apa yang diinderakan akan mempengaruhi tingkah laku.

Gibson, dkk (1989) dalam buku Organisasi Dan Manajemen Perilaku, Struktur; memberikan definisi persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan

oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap obyek). Gibson juga menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu. Oleh karena itu, setiap individu memberikan arti kepada stimulus secara berbeda meskipun objeknya sama. Cara individu melihat situasi seringkali lebih penting daripada situasi itu sendiri.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian persepsi merupakan suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memahami dan mengerti tentang stimulus yang diterimanya tersebut. Proses menginterpretasikan stimulus ini biasanya dipengaruhi pula oleh pengalaman dan proses belajar individu.

2.6 Partisipasi

2.6.1 Pengertian Partisipasi

Pendapat dan rumusan-rumusan yang terdapat secara umum menyatakan bahwa, partisipasi (masyarakat) adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya saja, namun pada kenyataannya tidak sesederhana itu, oleh karena itu perlu dikaji uraian selanjutnya yang lebih mendalam tentang partisipasi.

Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuwan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutip oleh Sastropetro (1988:13) sebagai berikut: “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan”. Berdasarkan pendapat tersebut, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terhadap kelompok.

Sejalan dengan pendapat di atas, Gordon W. Allport dalam Sastropetro (1988) menyatakan bahwa: “Seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/ ego yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam

pekerjaan atau tugas saja, dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya”. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka ada tiga buah unsur penting dalam partisipasi yaitu:

1. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Dalam partisipasi harus ada tanggung jawab, unsur tanggung jawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Achmadi, dirjen bangdes pada tanggal 18 – 19 januari 1978 pada simposium gotong – royong di Jakarta menyatakan : “Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya gotong – royong merupakan modal utama. Swadaya adalah kemampuan suatu kelompok masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar pemenuhan kebutuhan”.

Sekjen Depdagri, Darjono, SH, *dalam* Sastropetro (1988) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : “Partisipasi berarti keterlibatan dalam hal proses pengambilan keputusan, memutuskan kebutuhan dan menunjukan kebutuhan serta prioritas”.

Sastropetro (1988). Menjelaskan bahwa : “Partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran disertai tanggung – jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama”.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan diri/ ego dan tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja, dan ketiga unsur partisipasi tersebut di dalam realitanya tidak akan terpisahkan satu sama lain, tetapi akan saling menunjang. Dalam realitasnya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi ini sering dikaitkan dengan usaha di dalam mendukung program pembangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Santoso S. Hamidjoyo (1988), bahwa partisipasi mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan.
2. Menerima kembali hasil pembangunan dan bertanggung jawab terhadapnya.

3. Partisipasi berarti terwujudnya kreativitasnya dan oto aktifitas.

Dari ketiga hal tersebut di atas, jelas bahwa masalah partisipasi ini sangat penting, terlebih dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu partisipasi aktif segenap lapisan dalam pembangunan harus semakin luas dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan maupun di dalam menerima hasil pembangunan.

2.6.2 Bentuk dan Jenis – jenis Partisipasi

Dari beberapa kajian literatur tentang partisipasi masyarakat di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa konsep partisipasi diinterpretasikan secara luas. Oakley (1991) dalam Mustari (2011) mengartikan partisipasi ke dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Partisipasi sebagai bentuk kontribusi

Yaitu interpretasi dominan dari partisipasi dalam pembangunan di dunia ketiga adalah melihatnya sebagai suatu keterlibatan secara sukarela atau bentuk kontribusi lainnya dari masyarakat desa menetapkan sebelumnya program dan proyek pembangunan.

2. Partisipasi sebagai organisasi

Meskipun diwarnai dengan perdebatan yang panjang di antara para praktisi dan teoritis mengenai organisasi sebagai instrumen yang fundamental bagi partisipasi, namun dapat dikemukakan bahwa perbedaan organisasi dan partisipasi terletak pada hakekat bentuk organisasional sebagai sarana bagi partisipasi, seperti organisasi-organisasi yang biasa dibentuk atau organisasi yang muncul dan dibentuk sebagai hasil dari adanya proses partisipasi. Selanjutnya dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dapat melakukannya melalui beberapa dimensi, yaitu:

- a. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan).
 - b. Sumbangan materi (dana, barang, alat).
 - c. Sumbangan tenaga (bekerja atau member kerja).
 - d. Memanfaatkan/ melaksanakan pelayanan pembangunan.
3. Partisipasi sebagai pemberdayaan

Partisipasi merupakan latihan pemberdayaan bagi masyarakat desa, meskipun sulit didefinisikan. Akan tetapi, pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan.

Menurut Soelaiman (1985), bentuk - bentuk partisipasi sosial digolongkan ke dalam :

1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
2. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri walaupun terpaksa diperlukan dari luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
3. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
5. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Menurut Ndraha (1987) :

1. Partisipasi dalam kontak dengan pihak lain sebagai titik awal perubahan sosial.
2. Partisipasi dalam menyerap atau memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat atau menolaknya.
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan
4. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan
5. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan warga masyarakat dalam menilai pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauhmana kebutuhan masyarakat.

Partisipasi Menurut Hopley (1996) dalam Mustari (2011) antara lain :

1. Partisipasi Manipulasi (*Manipulative Participation*)

Karakteristik dari model partisipasi ini adalah keanggotaan bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja, dan atau kelompok-kelompok. Jadi tidak berbasis pada partisipasi individu.

2. Partisipasi Pasif (*Passive Participation*)

Partisipasi rakyat dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi, informasi dari administrator tanpa mau mendengar respon dari rakyat tentang keputusan atau informasi tersebut. Informasi yang disampaikan hanya untuk orang-orang luar yang profesional.

3. Partisipasi Melalui Konsultasi (*Participation by Consultation*)

Partisipasi rakyat dengan berkonsultasi atau menjawab pertanyaan. Orang dari luar mendefinisikan masalah-masalah dan proses pengumpulan informasi, dan mengawasi analisa. Proses konsultasi tersebut tidak ada pembagian dalam pengambilan keputusan, dan pandangan-pandangan rakyat tidak dipertimbangkan oleh orang luar.

4. Partisipasi Untuk Insentif (*Participation for Material Incentives*)

Partisipasi rakyat melalui dukungan berupa sumber daya, misalnya tenaga kerja, dukungan pangan, pendapatan atau insentif material lainnya. Mungkin petani menyediakan lahan dan tenaga, tetapi mereka dilibatkan dalam proses percobaan-percobaan dan pembelajaran. Kelemahan dari model partisipasi ini adalah apabila insentif habis maka teknologi yang digunakan dalam program juga tidak akan berlanjut.

5. Partisipasi Fungsional (*Functional Participation*)

Partisipasi dilihat dari lembaga eksternal sebagai suatu tujuan akhir untuk mencapai target proyek, khususnya mengurangi biaya. Rakyat mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk menentukan tujuan yang terkait dengan proyek. Keterlibatan seperti itu mungkin cukup menarik, dan mereka juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi cenderung keputusan tersebut diambil setelah keputusan utama ditetapkan oleh orang luar desa atau dari luar komunitas rakyat desa yang bersangkutan.

6. Partisipasi interaktif (*Interactive Participation*)

Partisipasi rakyat dalam analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan lembaga lokal. Partisipasi dilihat sebagai suatu hak, tidak hanya berarti satu cara untuk mencapai target proyek saja, tetapi melibatkan multi-disiplin metodologi dan ada proses belajar terstruktur. Pengambilan keputusan bersifat lokal oleh kelompok dan kelompok menentukan bagaimana ketersediaan sumber daya yang digunakan, sehingga

kelompok tersebut memiliki kekuasaan untuk menjaga potensi yang ada di lingkungannya.

7. Partisipasi inisiatif (*Self-Mobilisation*)

Partisipasi rakyat melalui pengambilan inisiatif secara indenpenden dari lembaga luar untuk melakukan perubahan sistem. Masyarakat mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal untuk advis mengenai sumber daya dan teknik yang mereka perlukan, tetapi juga mengawasi bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Hal ini dapat dikembangkan jika pemerintah dan LSM menyiapkan satu kerangka pemikiran untuk mendukung suatu kegiatan.

Bentuk – bentuk partisipasi masyarakat yang di kemukakan oleh WHO dalam Mustari (2011) sebagai berikut :

1. Konsultasi (*Consultation*)
2. Sumbangan keuangan oleh masyarakat (*A Financial Contribution By The Community*)
3. Proyek – proyek berdikari yang diselenggarakan oleh para dermawan (*Self – Help Project By Groups Of Beneficiaries*)
4. Proyek – proyek berdikari yang melibatkan seluruh masyarakat (*Self – Help Project Involving The Whole Community*)
5. Sumbangan dengan keterampilan khusus (*Community Specialized Works*)
6. Aksi massa (*Mass Action*)
7. Perjanjian kolektif untuk merubah tingkah laku (*Collective Commitment To Behavior Chage*)
8. Pembangunan yang bersifat endogaam (*Endogenous Development*)
9. Proyek – proyek otonomi masyarakat (*Autonomous community project*)
10. Pendekatan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (*Approaches To Self Sufficiency*)

Hampir serupa dengan WHO, Keith Davis (Santoso Sastropetro, 1988) mengemukakan pula, bahwa bentuk dan jenis – jenis partisipasi sebagai berikut :

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa
2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang

3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu/ instansi yang berada diluar lingkungan tertentu (dermawan/ pihak ketiga).
4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, dan dibiayai seluruhnya oleh komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti).
5. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat.
6. Aksi massa
7. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri.
8. Membangun proyek komuniti yang bersifat otonom.

Sedangkan jenis – jenis partisipasi :

1. Pikiran (*Psychological Participation*)
2. Tenaga (*Physical Participation*)
3. Pikiran dan tenaga (*Psychological and physical participation*)
4. Keahlian (*Participation with skill*)
5. Barang (*Material participation*)
6. Uang (*Money participation*)

Menurut Soetrisno (1995) bahwa secara umum, ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar di masyarakat, yaitu:

1. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/ proyek yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam definisi ini pun diukur dengan kemauan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan.
2. Partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi dan rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayahnya. Ukuran lain yang dapat digunakan adalah ada

tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu.

Partisipasi memiliki beberapa bentuk dan jenis partisipasi seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli pada paragraph diatas. Dari pemaparan tersebut diketahui bahwa partisipasi dapat dikategorikan tergantung dari individu yang melakukan partisipasi tersebut, sedangkan jenis-jenis partisipasi digolongkan antara lain; pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, barang, dan uang. Definisi mana yang dipakai akan sangat menentukan keberhasilan dalam mengembangkan dan memasyarakatkan sistem pembangunan wilayah yang partisipatif. Dalam sosiologi definisi pertama merupakan suatu bentuk lain dari mobilisasi rakyat dalam pembangunan.

2.6.3 Tahap-Tahap Partisipasi

Tahap-tahap Partisipasi Uraian dari masing-masing tahapan partisipasi adalah sebagai berikut :

1. Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal (Mardikanto, 2001).

2. Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan

Slamet (1993) membedakan ada tingkatan partisipasi yaitu: partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, partisipasi dalam tahap pemanfaatan. Partisipasi dalam tahap perencanaan merupakan tahapan yang paling tinggi tingkatannya diukur dari derajat keterlibatannya. Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus diajak turut membuat keputusan yang mencakup merumusan tujuan, maksud dan target. Salah satu metodologi perencanaan

pembangunan yang baru adalah mengakui adanya kemampuan yang berbeda dari setiap kelompok masyarakat dalam mengontrol dan ketergantungan mereka terhadap sumber-sumber yang dapat diraih di dalam sistem lingkungannya. Pengetahuan para perencana teknis yang berasal dari atas umumnya amat mendalam. Oleh karena keadaan ini, peranan masyarakat sendirilah akhirnya yang mau membuat pilihan akhir sebab mereka yang akan menanggung kehidupan mereka. Oleh sebab itu, sistem perencanaan harus didesain sesuai dengan respon masyarakat, bukan hanya karena keterlibatan mereka yang begitu esensial dalam meraih komitmen, tetapi karena masyarakatlah yang mempunyai informasi yang relevan yang tidak dapat dijangkau perencanaan teknis atasan (Slamet, 1993).

3. Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Di lain pihak, lapisan yang ada di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang kaya) yang lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan (Mardikanto, 2001).

Terkait dengan hal tersebut, maka partisipasi masyarakat menjadi elemen yang penting dalam pengembangan masyarakat. Menurut Adi (2001), partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Tahap *Assesment*

Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri.

2. Tahap *Alternative*

Program atau Kegiatan dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program.

3. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan.

4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil)

Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka dalam penelitian ini definisi partisipasi masyarakat yang dimaksudkan oleh peneliti, yakni keikutsertaan/ keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dengan memberikan sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan, di mana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan yang mengetahui betul kondisi di daerahnya sendiri, sehingga pembangunan yang nantinya dilaksanakan di daerah mereka betul-betul seperti yang mereka butuhkan.

5. Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan (Mardikanto, 2001).

6. Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang (Mardikanto, 2001).

2.6.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor – faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat (Sastropetro, 1988) :

1. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan social dan percaya terhadap diri sendiri.
2. Faktor lain adalah penginterpretasian yang dangkal terhadap agama
3. Kecenderungan menyalah artikan motivasi, tujuan dan kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk seperti halnya terjadi di beberapa Negara.
4. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih baik diluar pedesaan.
5. Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan

Angell (dalam Ross, 1967) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah

bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Sedangkan menurut Soelaiman (1980), unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah: Kepercayaan diri masyarakat, solidaritas dan integritas sosial masyarakat, tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakat, kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/ lingkungan. Menurut Soelaiman (1980) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/ lingkungan, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya.

2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial.
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

Sastropoetro (1985), menyatakan dalam hal partisipasi ternyata bahwa unsur-unsur penting dan turut menentukan adalah :

1. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian efektif/ berhasil.
2. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran.
3. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan.
4. Enthosiasme yang menumbuhkan spontanitas, yaitu kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain.
5. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama

Kemudian berikut ini adalah sebagian faktor yang dapat menjadi hambatan yang potensial bagi pelaksanaan partisipasi sosial.

1. Sikap sosial yang telah terbentuk dan membudaya, seperti *paternalistic*, feodalisme dan sebagainya.
2. Dominasi suami terhadap istri, laki-laki terhadap perempuan, orang tua terhadap anak.
3. Struktur pranata sosial yang berlapis-lapis.
4. Pengarahan, pembinaan, pengawasan yang berlebih dari pemerintah.
5. Sikap ketergantungan dan kepasrahan sebelum berusaha.
6. Jurang sosial yang besar.
7. Salah konsep tentang partisipasi di kalangan masyarakat

2.7 Program Batu Go Organik 2012

Program Batu Go Organik 2012 adalah program pertanian organik yang dicanangkan Pemerintah Kota Batu sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap pengembangan dan penerapan pertanian organik di Indonesia. Program Batu Go Organik 2012 ini merupakan program yang di instruksikan langsung oleh Walikota Batu dan termasuk didalam Program kerja Walikota Batu yang sesuai dengan visi dan misi kota Batu. Program Batu Go Organik 2012 ini bertujuan untuk mengubah cara bertani petani dari pertanian konvensional menuju pertanian yang organik dan bebas kimia, dengan begitu Kota Batu diharapkan mampu menjadi sentra pertanian organik yang berbasis pariwisata internasional.

Program “Go Organik” di kota Batu ini pertama kali dimulai pada tahun 2005 lalu namun belum mampu menuai hasil yang diharapkan, hal tersebut terbukti dari petani yang masih menggunakan pestisida kimia untuk memompa produktivitas tanamannya. Selain itu kegagalan tersebut terjadi karena masih minimnya pendampingan pada petani dalam melaksanakan kegiatan pertanian organik. Namun demikian, Pemerintah Kota Batu tetap berkomitmen agar program Batu Go Organik ini tetap terlaksana secara berkelanjutan.

Program pertanian organik ini adalah sebuah inovasi demi peningkatan hasil pertanian serta demi kesehatan bila dikonsumsi karena bebas dari pestisida dan bahan-bahan kimia yang lain. Oleh karena itu, Dinas Pertanian memprogramkan secara resmi untuk petani dan seluruh masyarakat di Kota Wisata Batu. Pengembangan pertanian organik juga sangat mendukung konsep pengembangan pariwisata di Kota Wisata Batu, seperti wisata petik sayur organik, wisata alami proses pelaksanaan pertanian organik dan sebagainya. Kepala Dinas Pertanian Kota Batu Ir. Sugeng Pramono menjelaskan bahwa pertanian organik sebenarnya telah lama dilakukan oleh masyarakat Kota Batu seperti oleh Petani di Desa Sumberejo. Namun baru akhir tahun 2011 dikembangkan secara terprogram dan simultan oleh Dinas Pertanian dan berbagai kalangan tertentu melalui berbagai program. Dan tahap awal, Pemerintah memberikan stimulan pupuk organik dan berbagai penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Latar belakang dilaksanakannya program pengembangan pertanian organik di Kota Batu adalah pertama, untuk menjaga keseimbangan tanah dengan memperbaiki kondisi tanah. Hal ini dimaksudkan agar lingkungan tidak terdegradasi oleh akibat pengolahan yang salah dan karena pupuk anorganik. Kedua, Demi Kesehatan Manusia dimana hasil pertanian itu aman dikonsumsi dan bermutu bagus. Terutama, program ini mampu mengurangi residu kimia pada produk-produk pertanian. Ketiga, Faktor ekonomi, karena hasil pertanian pupuk organik ini mempunyai segmen pelanggan tersendiri yang tak mempersoalkan harga jual, walaupun harga hasil pertanian organik bisa 3 kali lipat lebih mahal ketimbang produk pertanian dari cara konvensional biasa yang memakai pestisida dan sejenisnya.

Program pengembangan pertanian organik di masyarakat secara langsung dilaksanakan dan dipantau oleh Dinas Pertanian, bersama dengan Para Akademisi dari Universitas Brawijaya, para peneliti dari BPTP Karang Ploso, STTP Lawang, serta dukungan dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur.

Sementara di level teknik pelaksanaannya program ini adalah pertama, dengan cara Demonstrasi Pertanian yang dikerjakan di lokasi 4 titik yakni Desa Sumberbrantas, Sumberejo, Torongrejo dan Desa Pendem. Kedua, Penyuluhan atau sekolah lapangan di setiap kelompok tani (Gapoktan) melalui efektifitas pelatihan-pelatihan. Dari demonstrasi dan pelatihan ini, hasilnya kemudian dilokakaryakan dalam forum terbuka, sehingga kesimpulannya akan ditunjukkan dan dipraktekkan kepada para petani serta para investor, terutama dalam pengembangan pupuk organiknya.

Dalam pelaksanaan pertanian organik ini otomatis membutuhkan proses sekitar 3 – 5 tahun, terutama dalam mengembalikan kondisi tanah, sehingga mampu menghasilkan produk pertanian organik yang sehat dan bermanfaat secara berkelanjutan bagi anak cucu. Tetapi hasil pertanian yang dicanangkan oleh pemerintah kota batu ini nantinya akan diuji di laboratorium dulu sebelum resmi dikembangkan dan diperuntukkan kepada masyarakat. Berbagai metode pelaksanaan pertanian organik oleh Dinas Pertanian adalah pertama, memberi dan menuangkan pupuk organik dari kotoran ternak, daun-daunan dan tulang sapi. Kedua, Memberikan subsidi pupuk organik yang didapatkan dari Pemerintah

Pusat. Ketiga, membantu peralatan untuk membuat pupuk organik untuk diproses menjadi kompos, dan keempat yaitu Dinas melakukan pelatihan secara rutin kepada masyarakat untuk pembuatan pupuk organik. Pelaksanaan Program Pengembangan Pertanian Organik sejak pada tahap awal ini difokuskan pada 4 titik atau daerah yaitu di Desa Sumberbrantas dengan area 6,5 hektar, Di Desa Sumberejo 7,1 hektar, Desa Torongrejo 8,05 hektar, serta di Desa Pendem areanya seluas 10 hektar. Program ini dilaksanakan selama satu musim tanam, setelah itu dilanjutkan oleh para petani sendiri sampai mendapatkan sertifikasi organik sehingga mampu menjual produk organik yang tersertifikasi dan kemudian Dinas tinggal membimbing lebih jauh dan memperbaiki aplikasinya demi pengembangan pertanian di Kota Wisata Batu. (www.kotawisatabatu.com. Diakses 19 september 2013).

